

BAB III

PROSES DAN REALISASI *INTERFAITH DIALOGUE*

Pada bab ini penulis akan membahas tentang proses dan realisasi *Interfaith dialogue*, yang secara umum bab ini terdiri dari Gagasan *Interfaith dialogue*, Pengertian dan sejarah *interfaith dialogue* yang terdiri dari dua subjudul yaitu pengertian *interfaith dialogue*, dan sejarah *interfaith dialogue*. Kemudian di judul berikutnya akan membahas mengenai *interfaith dialogue* di Australia.

A. Pengajuan Gagasan *Interfaith Dialog*

Pada awal tahun 2002. Menteri Luar negeri Indonesia meluncurkan kegiatan "Foreign Policy Breakfast" sebagai sarana diskusi kebijakan luar negeri dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan suasana pagi hari yang masih segar dan tidak formal.⁴² Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkomunikasikan arah kebijakan serta menjadikan ajang diskusi sebagai upaya untuk memperoleh masukan, sehubungan dengan konsep diplomasi "*intermestik*" yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Diplomasi Indonesia menerapkan pola yang disebut sebagai "*intermestik*". Dengan pola tersebut, maka diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia tidak hanya sebagai "ujung tombak" menyuarakan kepentingan ke luar, tetapi juga mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan didunia luar ke dalam negeri. Komunikasi kedalam negeri

⁴² Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Sinopsis Fereign Policy breakfast*, gedung pancasila, departemen luar negeri, Jakarta, Selasa, 12 Juli 2005, 08.00-09.00

bertujuan untuk membentengi kepentingan nasional serta mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi arus tuntutan dunia.

Dalam peta politik domestic yang sangat pluralistic, setidaknya harus dibangun suatu strategi bersama, suatu rencana yang disepakati oleh semua pihak, untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Artinya, ketika memasuki arena politik luar negeri, semua komponen didalam negeri adalah satu kesatuan dalam menghadapi Negara-negara lain. Dalam kaitan itu, Menteri Luar Negeri RI mengundang para tokoh agama, intelektual dan wartawan senior untuk bertukar pandangan mengenai pentingnya "*interfaith dialog*" dan peran aktif Indonesia dalam memajukan kegiatan dialog antar agama ditingkat regional dan internasional.⁴³

Ide untuk menyelenggarakan suatu dialog antara para tokoh lintas agama dunia dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat pertemuan APEC di Bangkok pada tahun 2003, dibawah bendera tema "pemberdayaan kaum moderat". Ide tersebut kemudian dibahas lebih lanjut pada pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF) di Jakarta pada bulan Juli 2004. Pada pertemuan ARF tersebut Menlu Hasan Wirajuda dan Menlu Australia Alexander Downer secara bersama mengumumkan bahwa Indonesia dan Australia akan menjadi tuan rumah bersama bagi penyelenggaraan suatu dialog lintas agama pada tahun 2004.⁴⁴ Kemudian, untuk pertama kalinya ide tersebut direalisasikan dalam sebuah konferensi yang bertajuk "Dialogue on Interfaith Cooperation : Community Building and Harmony" di Sheraton Mustika Yogyakarta Hotel pada tanggal 6-7

⁴³ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. *Sinopsis Foreign Policy breakfast. Loc. Cit*

Desember. Konferensi ini diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Departemen Luarnegeri dan Perdagangan Australia, bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Konferensi tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dimana upacara pembukaan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr.N.Hasan Wirajuda, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Hon.Alexander Downer MP, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Syafii Maarif, dan Gubernur Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab, juga menjadi salah satu pembicara kunci pada konferensi tersebut.⁴⁵ Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 150 Delegasi dari 14 negara, terdiri dari para tokoh lintas agama dari Australia, Brunnei Darussalam, Filipina, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua Nugini, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Timor Leste, and Vietnam.⁴⁶ Pertemuan ini bertujuan untuk membangun suatu hubungan yang harmonis antara para penganut agama dan ke[percayaan yang berbeda dimasing-masing negara dan kawasan melalui peningkatan rasa saling percaya, niali-nilai kebersamaan, dan norma untuk hidup berdampingan secara damai.

Australia bersama-sama dengan Indonesia, Selandia Baru, Filipina, memprakarsai Dialog kerjasama Antar Agama Regional Asia Pasifik pada tahun 2004 di Yogyakarta, Indonesia. Sejak saat itu, forum itu menjadi pertemuan tahunan yang kokoh dimana yang terakhir diadakan di Perth Australia bulan

Oktober lalu. Kami juga ambil bagian dalam peluncuran Dialog Antar Agama Asia Eropa tahun 2005, yang juga menjadi acara tahunan yang besar.⁴⁷

Tujuan pertemuan ini adalah untuk membentuk kerjasama yang mendorong pembangunan komunitas dan semangat kebersamaan untuk mengantisipasi sebagai tantangan dan revolusi konflik, pembangunan pasca konflik, kekerasan, dan terorisme. Melalui dialog, para peserta diharapkan akan mengembangkan usulan dan konsep yang menyeluruh dalam menjembatani perbedaan serta menemukan dasar pandangan yang sama bagi kerjasama praktis.

Selain itu, pertemuan ini menjadi dasar bagi pengembangan jaringan regional kearah berbagai kegiatan yang melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas.⁴⁸ Dengan demikian, hasil dari Dialog mengenai Kerjasama Lintas Agama tersebut dapat memberikan pemahaman dan toleransi secara mendalam diantara kelompok agama dan kepercayaan bagi pembangunan masyarakat bagi pembangunan masyarakat yang damai, harmonis dan sejahtera dikawasan dan dilingkungan yang lebih luas.

Sebutan Interfaith Dialogue itu sendiri mengandaikan para peserta dialog telah mengalami pengalaman iman yang sungguh, pengalaman akan Tuhan sejati. Buah-buah dari pengalaman akan Tuhan itu adalah kerendahan hati, kedamaian, solidaritas, persaudaraan sejati, pengampunan dan rekonsiliasi, serta keutamaan-keutamaan pokok: iman, harapan dan kasih.⁴⁹

⁴⁷ *Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi*, Hal 5, No 32 Tahun III, 15 Juni-14 Juli 2010

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ Johannes Buiasumarta, *Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi*, Hal 3, No 32 Tahun III

Dialog antaragama menelurkan enam pernyataan bersama yang antara lain akan melakukan upaya bersama untuk saling memahami dan hidup harmonis dalam perbedaan agama. Demikian pernyataan yang dibacakan dua fasilitator dialog, yaitu Din Syamsudin dan rev. Richard Randerson di Yogyakarta, Selasa (7/12). Sebagai langkah lanjut, menurut Din, akan dibentuk pusat kerjasama budaya dan agama atau Centre for Cultural and Interfaith Cooperation yang berbasis di Yogyakarta. “ini rekomendasi dari delegasi Indonesia dan akan dibacakan lebih lanjut,” katanya.⁵⁰

B. Pengertian dan sejarah *Interfaith Dialogue*

Untuk lebih memahami konsep dan fungsi dari *Interfaith Dialogue* atau Dialog antar agama, terlebih dahulu akan saya paparkan mengenai pengertian dan sejarah lahirnya konsep dialog antar agama.

1. Pengertian *Interfaith Dialogue*

Interfaith Dialogue adalah Dialog yang dilakukan oleh para pemuka agama, budayawan serta kelompok-kelompok lain yang terkait yang membahas tentang isu-isu hangat seputar agama, budaya, dan toleransi.

Dialog adalah percakapan mengenai persoalan bersama antara dua atau lebih orang dengan perbedaan pandangan, yang tujuan utamanya adalah agar setiap partisipan dapat belajar dari yang lain sehingga ia dapat berubah dan tumbuh (swidler, 1983).⁵¹ Dialog ini, atau lebih tepatnya dialog antar agama,

⁵⁰ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0103.htm>, diakses 15 Desember 2010.

⁵¹ Zakiruddin Bhaidaww, *Dialog Global & Masa Depan Agama* Muhammadiyah University Press.

antar budaya dan antar ideologi, adalah cara melakukan perjumpaan dengan dan memahami diri sendiri dan dunia pada tingkatan terdalam, membuka kemungkinan-kemungkinan untuk menggali dan menanggapi makna fundamental kehidupan secara individual maupun kolektif dengan berbagai dimensinya.⁵²

Jadi, dialog dalam skala luas atau komunal adalah suatu cara baru dalam berfikir dan memahami dunia. Dialog dipahami dan dipraktekakan pada masa lalu oleh para manusia jenius –Gautama, Yesus, Sufi, Ghandi—tetapi belum pernah menjangkau kesadaran komunal.⁵³ Selama berabad-abad perbedaan agama, kebudayaan serta etnik telah membawa kepada kesalahpahaman, permusuhan dan konflik, prasangka, perang hingga kekerasan kultural mulai tumbuh subur hingga menjadi pemicu akan konflik yang menimbulkan pemusnahan terhadap manusia.

Terdapat arti penting dalam dialog itu, tentu saja bahwa dialog antar umat beragama masih sangat perlu, baik ditingkat nasional maupun internasional, karena meskipun tidak secara resmi, tetapi didalam kenyataan dan juga dalam pembertitaan media, perbedaan agama itu masih menjadi salah satu unsur yang menimbulkan kecurigaan, prasangka, dan hambatan komunikasi.⁵⁴

Jika rasa perbedaan atas berbagai budaya, etnik dan agama ini dapat diminimalisasi, maka dunia tentu akan memperoleh potensi kekuatan kreatif

⁵² *Ibid*, p. 11

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ Frans Magnis Suseno, *Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi*. Hal 13. No 32 Tahun

dari perbedaan atau keragaman budaya dan agama tersebut sehingga akan mengurangi potensi kekuatan-kekuatan destruktifnya. Kerena melalui dialog, para pemilik berbagai pandangan dapat saling belajar dan bekerjasama serta dapat mempromosikan pemahaman yang lebih baik dan simpatik tentang berbagai kebudayaan dan agama diantara mereka sehingga perbedaan yang ada dapat diakui dan terima dengan baik.

Sangat perlu bagi agama-agama untuk bicara satu sama lain dan juga memiliki wawasan internasional, jadi bukan hanya semacam opini dalam satu negara. Kalau misalnya Kristen dan muslim bicara, maka itu bukan hanya masalah Indonesia, karena kristen dan muslim itu ada diseluruh dunia, oleh karena itu sangat baik sekali kalau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mensponsori *Interfaith Dialogue* ini.⁵⁵

Hans Kung pernah mengatakan :

"No peace among the nations without a peace among religions, no peace among religions without dialogue between the religions, no dialogue between the religions without investigation the foundation of the religion".

Jadi intinya bahwa perdamaian itu dasarnya adalah dialog. Bahkan Peter L. Berger mengatakan ; *"those who neglect religion in their analyses of contemporary affairs do so at great peril"* jadi siapa-siapa yang mengenyahkan agama dari isu-isu kontemporer itu berarti dia tidak mengerti mengenai konteks hubungan internasional.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Andri Hadi, *Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi*, Hal 20, No 32 Tahun III, 15 Juni-

Madeleine Albright dalam satu pidatonya bahkan mengatakan bahwa pada awal-awalnya dia selalu mengajarkan kepada para diplomat untuk jangan menyentuh isu-isu yang sangat sensitif, termasuk agama, dalam foreign policy. Tetapi pada akhirnya ternyata dia sampai pada suatu kesimpulan bahwa mau tidak mau agama itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.⁵⁷

Ketika memperkenalkan bukunya,

the Mighty and the Almighty, Madéline Albright mengatakan; "X problem is complicated enough. Lets not bring God ang religion into it" But trough my being in office, and as I explored the subject much further in writing "The Mighty and the Almighty" I really though the opposite is true. In order to effectively conduct foreign policy today, you have to understand the role of God and religion.

Bahwa dia datang dari satu generasi dimana orang-orang selalu mengatakan jangan membawa bawa Tuhan dan agama kedalam masalah-masalah *foreign policy*, tetapi selama menjabat sebagai sebagai menteri luar negeri dia menganalisa, termasuk dalam buku yang dia tulis berikutnya, bahwa ternyata itu tidak benar. Kalau kita ingin melakukan *foreign policy yang efektif*, kita harus betul-betul memahami mengenai the role of God dan agama.⁵⁸

2. Sejarah *Interfaith Dialogue*

Melalui perjalanan yang berabad-abad, melintasi spektrum kebudayaan, umat manusia terus berupaya dan mencari jalan untuk mengembangkan teknologi yang efektif guna meraih kesejahteraan dan

kemakmuran hidup dimasa yang akan datang. Dalam perjalanannya, tradisi-tradisi filsafat, spiritual dan agama-agama besar telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan teknologi yang telah tercipta selama ini.

Namun, seiring dengan berjalannya evolusi kebudayaan, banyak perspektif, pandangan dunia, dan ideologi yang saling berkonfrontasi. Hubungan antar manusia terus mengalami kehancuran dan kemunduran. Jika hal ini dibiarkan, kekuatan-kekuatan dan ledakan-ledakan besar akan sangat mungkin terjadi dalam keadaan ketikan dimana berbagai pandangan dunia saling bertubrukan. Maka itu prioritas utama dalam menghadapi benturan-benturan kebudayaan masa kini adalah dengan mengembangkan dan menguji dialog global atau yang kemudian lebih dikenal dengan dengan *Interfaith Dialogue*.

Gerakan *Interfaith Dialogue* di Indonesia yang mulai bangkit di era 70-an dengan tokoh sentralnya mendiang Mukti Ali, kini telah meluas bukan hanya pada tataran kesadaran sosial masyarakat akan pentingnya dialog antar agama, tetapi juga telah terestimasi dalam wujud institusi sedemikian rupa sehingga kelompok pegiat dialog *interfaith dialogue* bertumbuhan dibanyak tempat di seluruh penjuru negeri ini.⁵⁹ Ada dua hal yang perlu dicermati sehubungan dengan geliat dialog antariman (*interfaith dialogue*) di Indonesia. Yakni, ketika *Interfaith dialogue* digagas secara penuh oleh pemerintah dan kemudian selanjutnya diannil alih partikelir. Dua pokok model pendekatan ini menjadi dasar untuk melihat pola gerakan *interfaith dialogue* di Indonesia.

⁵⁹ *Ibid.*

Namun begitu, ada rentang dan liuk perjalanan menarik bila menelisik dialektika perjalanan gerakan Interfaith Dialogue di Indonesia. Setidaknya, ada tiga catatan perjalanan yang menggambarkan bagaimana interfaith issues dan interfaith group berkembang sejak era Mukti Ali, berdasarkan dua pola gerakan diatas; model pemerintah dan kemudian dioper swasta.⁶⁰ Pertama, era eksperimentasi, yang tekanannya pada bentuk *Intellectual Exercise* dan digalakkan pemerintah dengan melakukab uji coba mempertemukan tokoh-tokoh agama.⁶¹ Era ini adalah era yang mana kecurigaan antar agama dieliminasi dengan mempertemukan tokoh-tokoh agama dalam berbagai bentuk kegiatan dan forum. Namun perlu dicatat, inisiatif gerakan ini masih diambil oleh pemerintah yang dalam hal ini Departemen Agama dibawah kendala Mukti Ali.

Tahap kedua adalah tahap regulasi yang membuat perubahan kebijakan pemerintah terhadap isu interfaith kemudian berbeda.⁶² Era ini bisa dicatat ketika Menteri Agama setelah Mukti Ali dijabat oleh Alamsyah Ratuperwiranegara. Pada era ini diterbitkan banyak regulasi yang mengatur hubungan antar pemeluk agama. Artinya, pendekatan yang semula adalah pendekatan kultural, berubah menjadi pendekatan struktural dengan mengedepankan regulasi-regulasi. Pada era Alamsyah pula terbit SK Menteri Agama No.70/1978 tentang pedoman penyiaran agama dan mengerucutnya

pengakuan lima agama.⁶³ Pertemuan antar tokoh dan pemeluk agama yang sebelumnya secara aktif diselenggarakan pemerintah kemudian menurun drastis.

Namun, justru secara perlahan, apa yang telah dilakukan pada tahap pertama, tepatnya ditahap eksperimentasi, ternyata telah melahirkan kesadaran luar biasa yang tidak kalah hebatnya dengan timbulnya pencerahan (aufklarung) di jaman *renaissance* Eropa. Banyak tokoh agama dan terutama tokoh muda mengambil inisiatif menggagas penyebaran pentingnya kesadaran toleransi dan pluralisme tanpa melibatkan negara. Era ini kurang lebih berjalan di akhir 80-an hingga sekarang, pada tahap inilah, mungkin bisa disebut tahapan ketiga, yang mana isu interfaith telah diakuisisi oleh partikelir.⁶⁴ Dampak selanjutnya, bermunculanlah berbagai organisasi interfaith diseluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua.

Disisi lain peristiwa teror 11 September telah memberikan implikasi yang luas keseluruh dunia dan menghentak negara-negara didunia untuk bersikap waspada dan curiga. Sejak saat itulah terorisme kemudian dinilai sebagai ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Namun sayangnya ini juga sekaligus memunculkan tuduhan dari negara-negara Barat terhadap kelompok-kelompok agama tertentu sebagai pelaku terorisme.⁶⁵

Hal tersebut memunculkan adanya kebutuhan dan kepentingan bagi negara negara untuk memproyeksikan citra yang baik sebagai negara yang

⁶³ Diplomasi Publik Deplu, Loc.Cit

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi, Hal 3, No 32 Tahun III, 15 Juni-14 Juli 2010

multikultur melalui upaya pengembangan budaya dialog lintas agama yang mengedepankan sikap toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban.

C. Interfaith Dialogue di Australia

Sebagai tindak lanjut dari Yogyakarta Dialogue on Interfaith Cooperation (Desember 2004), Cebu Dialogue on Regional Interfaith Cooperation (Maret 2006), Waitangi Dialogue on Building Bridges (Mei 2007), dan Phnom Penh Dialogue on Interfaith Cooperation for Peace and Harmony (April 2008), Pemerintah Australia telah menjadi tuan rumah 5th Regional Interfaith Dialogue yang diselenggarakan di Perth, Australia pada tanggal 28 - 30 Oktober 2009.⁶⁶

Sebagaimana penyelenggaraan dialog sebelumnya, Indonesia sebagai inisiator dan co-sponsor dialog telah mengirimkan delegasi sebanyak 14 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh agama, akademisi, media dan generasi muda antara lain KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, Dr. Soedibyo Markus, Ketua PP. Muhammadiyah, Prof. Dr. Philip Widjaja, Sekjen Walubi dan Uni Lubis, ANTV. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Duta Besar RI untuk Australia, Primo Alui Joelianto.

Dialog dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari 14 negara, yaitu: Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Papua New Guinea, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam, dan Australia sebagai tuan rumah. Dialog yang dibuka oleh Gubernur Australia Barat,

⁶⁶ <http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=2897&l=id>, diakses 25 Desember 2010

H.E. Dr. Ken Michael, AC, membahas empat tema utama yaitu; Building relationships among future faith leaders: fostering networks and practical partnership among future faith leaders, Faith and education: preventing the radicalisation of vulnerable youth, Conflict resolution and peace-building: combating misinformation, prejudice and bigotry about various faith groups, Faith and media/internet: combating religious stereotypes.

Pertemuan ini berhasil mensepakati 14 butir rekomendasi untuk dijadikan landasan bagi kegiatan-kegiatan Interfaith Dialogue baik domestik maupun regional, yang dituangkan dalam Perth Declaration. Adapun butir-butir yang cukup menonjol dalam deklarasi antara lain adalah:

1. Mendorong peran pemerintah dan komunitas beragama untuk membina pemuka agama masa depan melalui kegiatan yang dapat diimplementasikan oleh masing-masing negara (butir 4).
2. Mendorong dilakukannya pelatihan bagi pemuka agama masa depan untuk dapat memahami agama dan budaya lain sehingga dapat meningkatkan toleransi bagi pemimpin maupun umatnya (butir 5).
3. Mendorong peran pemerintah dan masyarakat madani termasuk kelompok umat beragama untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya penyelesaian konflik dan perdamaian (butir 10).
4. Mendorong komunitas beragama untuk menciptakan pelatihan bagi media serta melatih pelaku media untuk memahami isu-isu keagamaan (butir 12).

Dialog ini ditutup oleh Menteri Luar Negeri Australia, Honorable Stephen Smith MP. Menlu Smith menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada

tiga negara co-sponsor serta seluruh delegasi yang telah menghasilkan kesepakatan tertulis, Perth Declaration. Menlu Smith juga mendorong seluruh peserta untuk mengimplementasikan kesepakatan yang tertulis dalam deklarasi dalam kegiatan di masing-masing negara, serta meningkatkan kerjasama di kawasan.⁶⁷

Australia, untuk kemudian bersama-sama dengan Indonesia, Selandia Baru dan Filipina, mensponsori Dialog Antaragama Waitangi. Australia bersama-sama mendirikan Regional Dialog dengan Indonesia pada tahun 2004 dan, sejak saat itu, Dialog telah pergi dari kekuatan untuk kekuatan. Seperti yang diungkapkan The Hon. Alexander Downer, MP, mantan Menteri Luar Negeri Australi, “dengan menjadi sponsor, kami berkomitmen untuk memupuk saling menghormati, pemahaman dan toleransi antar berbagai agama dan budaya di seluruh wilayah kita. Tak satu pun dari kami ingin memungkinkan ekstremis untuk mengatur agenda dengan upaya yang disengaja mereka untuk menciptakan perpecahan dan menghasut kekerasan. Kami ingin melakukan segala sesuatu yang kita bisa untuk memberdayakan mayoritas moderat yang mencari perdamaian, harmoni dan toleransi dalam semua komunitas kita”.⁶⁸ Dialog akan melibatkan para ahli iman dan tokoh masyarakat dan agama dari masing-masing negara ASEAN, Australia, Timor Timur, Fiji, Selandia Baru dan Papua New Guinea.

Delegasi Australia: Kardinal George Pell, Uskup Agung Katolik Sydney; Pendeta Yohanes Baldock, Gereja Anglikan; Pendeta Sefarosa Carroll, Gereja Bersatu; Pendeta John Henderson, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Gereja-

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ http://www.foreignminister.gov.au/releases/2007/fa060_07.html, diakses 25 Desember 2010

gereja di Australia; Uskup Agung Aghan Baliozian, Keuskupan dari Gereja Armenia Australia dan Selandia Baru; Patel Ikebal Bapak, Presiden Federasi Dewan Islam Australia, Dr Ameer Ali, Wakil Presiden Dewan Daerah dakwah Islam di Asia Tenggara dan Pasifik, Kim Bapak Hollow, Wakil Presiden, Federasi dari Dewan Buddhis Australia; Suster OP Patricia Madigan, Gereja Katolik; Mr Tom Calma, Komisaris Ras Diskriminasi Nasional; Jones Jeremy Bapak AM, Direktur Urusan Internasional dan Masyarakat, Australia / Israel dan Yahudi Affairs Council; Kahn Shafiq Sheikh, Ketua Australia Islamic Cultural Centre; Mr Mehta Prakash, Anggota Dewan Hindu Australia; dan Profesor Swee-Hin Toh, Direktur, Multi-Faith Centre, Universitas Griffith.⁶⁹

D. Urutan Kegiatan Interfaith Dialogue Australia-Indonesia

Berikut adalah tabel kegiatan Interfaith Dialogue, mulai dari tercetusnya program tersebut, hingga sampai pelaksanaan kegiatannya. Yaitu mulai pada tahun 1970-an sampai 2009, yang berlokasi di Indonesia dan Australia.

⁶⁹ *Ibid.*

Tabel 3.1

Tabel Kegiatan Urutan Interfaith Dialogue Indonesia-Australia

| No | Tahun | Lokasi | Keterangan |
|----|---------------|------------------|--|
| 1 | 70-an | Indonesia | Gerakan Interfaith Dialogue di Indonesia yang mulai bangkit di era 70-an dengan tokoh sentralnya mendiang Mukti Ali. ⁷⁰ |
| 2 | Juli 2004 | Jakarta | Pada pertemuan ARF Menlu Hasan Wirajuda dan Menlu Australia Alexander Downer secara bersama mengumumkan bahwa Indonesia dan Australia akan menjadi tuan rumah bersama bagi penyelenggaraan suatu dialog lintas agama pada tahun 2004. ⁷¹ |
| 3 | Desember 2004 | Yogyakarta | Diselenggarakan pertama kali Dialog tersebut, Yogyakarta Dialogue on Interfaith Cooperation. ⁷² |
| 4 | Oktober 2009 | Perth, Australia | Pemerintah Australia telah menjadi tuan rumah 5th Regional Interfaith Dialogue yang diselenggarakan di Perth, Australia pada tanggal 28 - 30 Oktober 2009. ⁷³ |
| 5 | Oktober 2009 | Perth, Australia | Pertemuan ini berhasil mensepakati 14 butir rekomendasi untuk dijadikan landasan bagi kegiatan-kegiatan Interfaith Dialogue baik domestik maupun regional, yang dituangkan dalam Perth Declaration. ⁷⁴ |
| 6 | Oktober 2009 | Perth, Australia | Dialog ini ditutup oleh Menteri Luar Negeri Australia, Honorable Stephen Smith MP. Menlu Smith menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tiga negara co-sponsor (termasuk Indonesia), serta seluruh delegasi yang telah menghasilkan kesepakatan tertulis, Perth Declaration. ⁷⁵ |

Sumber :

1. Andri Hadi, *Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi*, Hal 20, No 32 Tahun III, 15 Juni-14 Juli
2. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Sinopsis Fereign Policy breakfast*, Loc. Cit
3. *Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi*, Hal 3, No 32 Tahun III, 15 Juni-14 Juli 2010

⁷⁰ Andri Hadi, *Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi*, Hal 20, No 32 Tahun III, 15 Juni-14 Juli

⁷¹ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Sinopsis Fereign Policy breakfast*, Loc. Cit

⁷² *Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi*, Hal 3, No 32 Tahun III, 15 Juni-14 Juli 2010